



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, penyesuaian belanja daerah dan pembiayaan daerah yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 60) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 1 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Nomor 2 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 2);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp1.666.796.638.856,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp104.583.513.101,00 sehingga menjadi Rp1.771.380.151.957,00 terdiri dari:

A. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

a. Pajak Daerah

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Semula                             | Rp156.708.275.900,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang)              | Rp0,00               |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp156.708.275.900,00 |

b. Retribusi Daerah

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula                | Rp17.482.117.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp0,00              |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan                                  | Rp17.482.117.000,00    |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                       |                        |
| 1. Semula  | Rp6.405.414.000,00     |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00                 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan | Rp6.405.414.000,00     |
| d. Lain-lain PAD yang Sah  |                        |
| 1. Semula  | Rp142.480.788.000,00   |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00                 |
| Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan                            | Rp142.480.788.000,00   |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan                            | Rp323.076.594.900,00   |
| 2. PENDAPATAN TRANSFER   |                        |
| a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                    |                        |
| 1. Semula  | Rp1.112.017.601.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00                 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan              | Rp1.112.017.601.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah  |                        |
| 1. Semula  | Rp132.040.899.599,00   |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp76.427.467.288,00    |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan                  | Rp208.468.366.887,00   |
| Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan                               | Rp1.320.485.967.887,00 |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan  | Rp1.643.562.562.787,00 |
| B. BELANJA   |                        |
| 1. BELANJA OPERASI   |                        |
| a. Belanja Pegawai   |                        |
| 1. Semula  | Rp833.261.340.578,00   |
| 2. Bertambah/(Berkurang)   | (Rp1.378.545.233,00)   |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan                                   | Rp831.882.795.345,00   |

|    |  |                        |
|----|--|------------------------|
| b. | Belanja Barang dan Jasa                                    |                        |
| 1. | Semula   | Rp581.644.915.007,00   |
| 2. | Bertambah/(Berkurang)                                      | Rp74.587.144.528,00    |
|    | Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan           | Rp656.232.059.535,00   |
| c. | Belanja Bunga  |                        |
| 1. | Semula   | Rp1.000.000.000,00     |
| 2. | Bertambah/(Berkurang)                                      | Rp0,00                 |
|    | Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan                     | Rp1.000.000.000,00     |
| d. | Belanja Subsidi  |                        |
| 1. | Semula   | Rp1.250.000.000,00     |
| 2. | Bertambah/(Berkurang)                                      | Rp512.325.000,00       |
|    | Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan                   | Rp1.762.325.000,00     |
| e. | Belanja Hibah  |                        |
| 1. | Semula   | Rp87.167.362.778,00    |
| 2. | Bertambah/(Berkurang)                                      | (Rp153.356.326,00)     |
|    | Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan                     | Rp87.014.006.452,00    |
| f. | Belanja Bantuan Sosial                                     |                        |
| 1. | Semula   | Rp4.485.500.000,00     |
| 2. | Bertambah/(Berkurang)                                      | (Rp11.050.000,00)      |
|    | Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan            | Rp4.474.450.000,00     |
|    | Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan                   | Rp1.582.365.636.332,00 |
| 2. | BELANJA MODAL  |                        |
| a. | Belanja Modal Tanah  |                        |
| 1. | Semula   | Rp1.699.400.000,00     |
| 2. | Bertambah/(Berkurang)                                      | Rp0,00                 |
|    | Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan               | Rp1.699.400.000,00     |
| b. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                          |                        |
| 1. | Semula   | Rp36.303.567.550,00    |
| 2. | Bertambah/(Berkurang)                                      | Rp36.029.855.128,00    |
|    | Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan | Rp72.333.422.678,00    |

|    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| c. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   |                        |
|    | 1. Semula   | Rp40.703.505.249,00    |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp6.092.686.960,00     |
|    | Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan                | Rp46.796.192.209,00    |
| d. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                |                        |
|    | 1. Semula   | Rp36.522.794.794,00    |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)  | (Rp4.283.381.956,00)   |
|    | Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan       | Rp32.239.412.838,00    |
| e. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  |                        |
|    | 1. Semula   | Rp800.702.900,00       |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)  | (Rp45.000.000,00)      |
|    | Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan                 | Rp755.702.900,00       |
|    | Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan                                    | Rp153.824.130.625,00   |
| 3. | BELANJA TIDAK TERDUGA   |                        |
|    | Belanja Tidak Terduga   |                        |
|    | 1. Semula   | Rp20.457.550.000,00    |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)  | (Rp6.767.165.000,00)   |
|    | Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan                            | Rp13.690.385.000,00    |
|    | Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan                            | Rp13.690.385.000,00    |
|    | Jumlah Belanja Setelah Perubahan  | Rp1.749.880.151.957,00 |
|    | Total Surplus/(Defisit)   | (Rp106.317.589.170,00) |
| C. | PEMBIAYAAN  |                        |
| 1. | PENERIMAAN PEMBIAYAAN   |                        |
|    | Sisa Lebih Perhitungan  |                        |
| a. | Anggaran Tahun Sebelumnya   |                        |
|    | 1. Semula   | Rp89.661.543.357,00    |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp28.156.045.813,00    |
|    | Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp117.817.589.170,00   |

|    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| b. | Penerimaan Pinjaman Daerah   |                      |
|    | 1. Semula  | Rp10.000.000.000,00  |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00               |
|    | Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan                      | Rp10.000.000.000,00  |
|    | Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan                           | Rp127.817.589.170,00 |
| 2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN   |                      |
| a. | Pembentukan Dana Cadangan  |                      |
|    | 1. Semula  | Rp10.000.000.000,00  |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00               |
|    | Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan                       | Rp10.000.000.000,00  |
| b. | Penyertaan Modal Cadangan  |                      |
|    | 1. Semula  | Rp1.500.000.000,00   |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00               |
|    | Jumlah Penyertaan Modal Cadangan Setelah Perubahan                       | Rp1.500.000.000,00   |
| c. | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                          |                      |
|    | 1. Semula  | Rp10.000.000.000,00  |
|    | 2. Bertambah/(Berkurang)   | Rp0,00               |
|    | Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan | Rp10.000.000.000,00  |
|    | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan                          | Rp21.500.000.000,00  |
|    | Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan                                | Rp106.317.589.170,00 |
|    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Setelah Perubahan  | Rp0,00               |

2. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  - d. Dinas Sosial;
  - e. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
  - f. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  - g. Kecamatan Cihideung;
  - h. Kecamatan Cipedes;
  - i. Kecamatan Tawang;
  - j. Kecamatan Indihiang;
  - k. Kecamatan Kawalu;
  - l. Kecamatan Cibeureum;
  - m. Kecamatan Tamansari;
  - n. Kecamatan Mangkubumi;
  - o. Kecamatan Bungursari; dan
  - p. Kecamatan Purbaratu.
3. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2B

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Tasikmalaya ini.

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3B

Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 April 2023

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 april 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 6